

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT INVESTASI ASING DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Pada bab ini penulis memaparkan alasan mengapa suatu investasi asing ingin menanamkan modalnya di Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni terdiri dari faktor faktor pendorong atau penarik investasi asing untuk investor menanamkan modalnya. Serta, di dalam bab ini akan dijelaskan juga mengenai permasalahan-permasalahan atau kendala yang terjadi di dalam kegiatan investasi asing di Provinsi Sulawesi Tenggara.

A. Alasan Kegiatan Penanaman Modal Asing di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Investasi atau penanaman modal asing (PMA) merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Investasi juga dinilai secara langsung maupun tidak langsung dapat mendorong iklim atau dunia usaha sehingga mempercepat pembangunan ekonomi negara. Kegiatan investasi atau penanaman modal asing (PMA) itu sendiri memiliki tingkat resiko yang kecil dibandingkan dengan aliran modal lainnya seperti pinjaman luar negeri maupun portofolio. Investasi tersebut memiliki manfaat jangka panjang (permanen) yaitu di antaranya:

1. Mengupayakan pembangunan perekonomian wilayah penerima (*Host Country*). Karena sumber dana modal asing dapat mempercepat laju investasi serta pertumbuhan ekonomi.
2. Kesejahteraan rakyat meningkat dan sebagai tolak ukur keadaan ekonomi sebelumnya pada suatu daerah.
3. Menciptakan lowongan pekerjaan untuk penduduk pada wilayah investasi khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Mengurangi jumlah angka pengangguran dan kemiskinan karena adanya penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak dengan diberi ilmu pengetahuan dan keahlian khusus.

4. Terjadinya transfer teknologi bagi wilayah penerima investasi dan memantau proses industrialisasi yang sedang dilaksanakan.³¹

Kegiatan penanaman modal asing tidak lain dilakukan untuk meraup keuntungan jangka panjang maupun jangka pendek dari semua pihak baik penanam modal itu sendiri maupun pihak tuan rumah yang memberi izin menanamkan modalnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun, kegiatan penanam modal terlebih dahulu para penanam modal yang ingin menanamkan modalnya di Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pemantauan aspek untuk menunjang keuntungan yang besar. Berikut merupakan alasan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai wilayah yang pantas untuk menerima masuknya penanaman modal atau investasi:

5. Sulawesi Tenggara merupakan wilayah yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dan memiliki lahan yang banyak mengandung barang tambang yang terdapat di berbagai daerah.
6. Iklim politik dan sosial di Sulawesi Tenggara yang cukup kondusif memungkinkan terciptanya iklim investasi yang stabil dan baik. Sehingga membuat investor tertarik menanamkan modalnya di Sulawesi Tenggara.
7. Sifat pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang mendukung iklim investasi dengan memberi kemudahan kemudahan untuk para investor menanamkan modalnya. Karena kondisi investasi di suatu wilayah tidak hanya bergantung pada kondisi lingkungan, melainkan sikap pemerintah yang pro-investasi. Seperti memperbaiki unit layanan perizinan mulai dari pusat dan daerah kemudian mencabut Perda yang tidak mendukung investasi.
8. Realisasi Investasi di Sulawesi Tenggara pada tahun 2015-2019 meningkat.

³¹ Mohtar Masoed. (1997). "Bahan Kuliah Perusahaan Multinasional dalam Ekonomi Politik Internasional, Ilmu Hubungan Internasional". Yogyakarta: Fisipol UGM. Hlm. 129.

Kegiatan investasi merupakan kegiatan yang tidak hanya menguntungkan hanya kepada satu pihak, melainkan investor dalam kegiatan investasi juga memiliki sasaran strategis yang berbeda satu sama lain, adanya pertimbangan untuk menanamkan atau meningkatkan investasinya di suatu negara antara lain dengan memperhitungkan kondisi manfaat, resiko dan biaya.

B. Potensi Investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sulawesi Tenggara merupakan wilayah dengan kekayaan barang tambang yang melimpah khususnya nikel. Ada lebih dari seratus perusahaan lokal maupun saing (kecil/besar), seperti perusahaan milik pemerintah yaitu PT. Antam TBK yang membangun pusat smelter atau pengelolaan dan pemurnian bijih nikel yang terdapat di Tinangea, Konawe Selatan pada tahun 2014, pembangunan smelter nikel tersebut menelan biaya mencapai 100.000.000,- USD. Tidak hanya nikel, barang tambang lainnya juga banyak terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara seperti emas dan aspal. Selain barang tambang, sektor perkebunan dan perikanan juga layak untuk dipertimbangkan di Provinsi Sulawesi Tenggara.³²

Iklim investasi di Sultra sangat menggembirakan, tercatat bahwa realisasi investasi di Sultra pada tahun 2017 mencapai Rp 11 triliun, nilai tersebut melampaui perkiraan atau target nasional. Peningkatan tersebut dinilai tidak lepas dari potensi berbagai sektor di Provinsi Sulawesi Tenggara. Diantaranya, sumber daya alam (SDA) dalam sektor pertambangan yang begitu melimpah seperti nikel, aspal, emas dan hasil tambang lainnya. Tidak di pungkiri bahwa sektor pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan penyumbang tertinggi di wilayah tersebut.

Bidang lainnya yaitu seperti sektor peternakan, pariwisata, perikanan, budaya, pertanian dan industri jasa. Semua potensi tersebut tersebar di 16 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Potensi yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut

³² M. Yamin Pua Upa, Sholhatun, syahril mayus. (2015), "Potensi & Peluang Investasi di Indonesia". Jakarta Selatan: IP-BKPM dan Nusa Global. Hlm. 196.

merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan penanaman modal.

1. Sumberdaya Alam Provinsi Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tenggara merupakan salah satu Provinsi yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat di bagian tenggara dari pulau Sulawesi dengan ibu kota Kendari yang secara geografis terletak pada posisi 2°45' dan 6°15' Lintang Selatan, 120°45' dan 24°45' Bujur Timur. Secara administratif Provinsi Sulawesi Tenggara berbatasan dengan beberapa wilayah, antara lain: Di bagian utara berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah; Di bagian timur berbatasan dengan Laut Banda; Di bagian selatan berbatasan dengan Flores, dan di bagian Barat berbatasan dengan Teluk Bone.

Pada tahun 2017 tercatat di provinsi Sulawesi Tenggara terdapat 15 wilayah kabupaten dan 2 wilayah kota, diantaranya yaitu: kabupaten Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Muna, Muna Barat, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Bombana dan Wakatobi. Serta kota Kendari (Ibkota provinsi Sulawesi Tenggara) dan Kota Baubau.³³

Sulawesi Tenggara merupakan daerah yang memiliki sumberdaya alam yang berlimpah yang berpotensi bagi pemasukan dan perkembangan daerah. Sebagian besar masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara bekerja pada sektor primer yang bergantung pada alam. Kayanya potensi alam di Sulawesi Tenggara yang dikelola masyarakat menjadikannya sumber penghasilan yang terlihat pada tingginya presentasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sebagai penyumbang terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian penyumbang kedua disusul oleh sektor Pertambangan dan

³³ Badan Pusat Statistik. 2018. "Sulawesi Tenggara Dalam Angka". Kendari: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. hlm. 6.

Penggalian. Dan Sumberdaya alam di provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari beberapa sektor, antara lain:

a. Sektor Pertanian

Menurut topografinya, Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki permukaan tanah yang bergelombang, bergunung dan berbukit. Dan diantara gunung dan bukit-bukit terbentang dataran yang merupakan daerah yang berpotensi untuk pengembangan sektor pertanian. Sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Tenggara umumnya menghasilkan bahan pangan (Padi, kacang, jagung, kedelai dan ubi-ubian), hortikultura (sayur-sayuran dan buah), perkebunan, perikanan dan peternakan. Produksi bahan pangan yang signifikan adalah padi, jagung ubi jalar dan ubi kayu yang tergolong tanaman pangan. Penghasil padi terbanyak di Sulawesi Tenggara berada di wilayah Konawe. Sedangkan jagung terkonsentrasi di Kabupaten Muna, sedangkan ubi kayu dan ubi jalar banyak dihasilkan dari Kabupaten Buton dan Muna. Jenis tanaman pangan yang paling dominan adalah padi. Mengenai potensi beras dapat dilihat sebagai berikut:

Di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat beberapa sawah yang menggunakan irigasi secara teknis maupun non teknis. Luas total sawah yang menggunakan sistem pengairan seluas 70.726 hektar. total luas wilayah tersebut terdiri dari sawah berpengairan setengah teknis seluas 20.163 hektar, berpengairan sederhana PU seluas 10.460 hektar, berpengairan teknis seluas 24.744 hektar, berpengairan irigasi desa seluas 15.359 hektar. sedangkan luas area persawahan yang menggunakan sistem tadah hujan mencapai luas 13.858 hektar, sistem pengairan pasang surut seluas 2.211 hektar, dan sistem pengairan lainnya seluas 1.212 hektar.

Dari total keseluruhan wilayah persawahan tersebut, Provinsi Sulawesi Tenggara Mampu menghasilkan 57,943 ton padi setiap tahunnya yang berasal dari lahan irigasi teknis dan non teknis. Untuk

hasil pertanian lainnya mencapai 9.860 ton jagung yang berasal dari lahan seluas 16.253 hektar per-sekali panen. Sedangkan ubi jalar di Provinsi Sulawesi Tenggara mampu menghasilkan hasil panen mencapai 142.20 ton setiap tahunnya dengan area seluas 3.960 hektar.

b. Sektor Kehutanan

Pada tahun 2017, Luas kawasan hutan dan perairan di Sulawesi Tenggara seluas 2.333.155 hektar. dari luas kawasan tersebut, produksi kayu bulat mencapai 46.462,07 m² dan kayu pergajian sebanyak 44.826,79 m². Disektor kehutanan, terdapat lima hutan suaka alam, 42 hutan lindung dan 52 hutan cagar budaya. Luas kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara seluruhnya mencapai 1.061.270 hektar atau 40,82%. Pada tahun 2015 tercatat adanya 1.202.040 hektar lahan kritis yaitu suatu kondisi lahan yang tidak dapat memberi suatu manfaat dan tidak aanya fungsi dari lahan tersebut karena mengalami degradasi.³⁴ Hasil hutan terbagi berdasarkan berbagai jenis hutan, diantaranya yaitu hasil hutan ikutan dan Non HPH. Hasil hutan ikutan yaitu rotan menvcapai 14.861,82 MA,A³ (*Cubic Meter*).

c. Sektor Perikanan dan Kelautan

Sumber daya perikanan dan hasil laut Propinsi Sulawesi Tenggara dinilai mempunyai potensi kandungan yang cukup besar dan prospek yang sangat baik bagi pemenuhan permintaan pasar domestik dan internasional dengan komoditas andalannya antara lain ikan cakalang, tuna, teri, layang, dan ikan kerapu yang terdapat di Londano, Bungkinalo, Lakare, Runa, dan Lasolo.³⁵

³⁴ Cecep Risnandan dan Ali Fahmi .(2018). “Lahan Kritis”. Jurnalbumi.com. diakses dari <https://jurnalbumi.com/knol/lahan-kritis/> pada 15 Desember 2018.

³⁵ Bappenas. (2004). “Pembangunan daerah tingkat I Sulawesi Tenggara” Bappenas.go.id. diakses dari https://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/8769/1733/ pada 15 desember 2018.

Pada lokasi penangkapan ikan berpotensi mencapai 250.000 ton pertahaun. Saat ini, tingkat pemanfaatan sebanyak 157.479 ton pertahun. Dengan jenis produksi antara lain ikan layang, kembung, lemuru, ikan merah, tenggiri dan kerapu. Pada perairan Laut Banda, Teluk Bone dan Teluk Tomini (perairan Zona Eksklusif Ekonomi) potensi ikan mencapai 77.500 ton pertahun.

Produksi perikanan di Sulawesi Tenggara didominasi oleh perikanan budidaya, dengan produksi sebesar 1.016.382 ton pada tahun 2017 berasal dari budidaya laut. Sedangkan untuk perikanan tangkap produksinya meningkat yaitu sekitar 151.680 ton pada tahun 2016 dan ditahun 2017 mencapai 203.872 ton.

d. Sektor Peternakan

Sektor peternakan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara di dominasi oleh produksi ternak sapi, domba, kambing, itik dan babi. Produksi daging dari hewan ternak di Sulawesi Tenggara tahun 2017 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yakni di tahun 2016 mencapai 18.821.166 kg sedangkan di tahun 2017 produksi daging hewan ternak di Sulawesi tenggara mencapai 21.057.951 kg. Kenaikan produksi daging tersebut yaitu untuk produksi daging sapi potong yakni dari 4.412.704 kg menjadi 5.103.796 kg.

e. Sektor Perkebunan

Sektor perkebunan Provinsi Sulawesi Tenggara didominasi oleh tanaman kopi, kelapa sawit, kakao, lada, vanili tebu dan jambu mete. Namun, kakao menjadi komoditi unggulan atau dominan yang dihasilkan di Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tahun 2017 produksi kakao mencapai 125.380 ton dari luas tanam 255.380 hektar. Selain kakao, tanaman kelapa, jambu mete dan nilan memiliki produksi dalam jumlah yang besar yaitu

mencapai masing-masing 46.261 ton, 34.90 ton dan 13,983 ton.

f. Sektor Pariwisata

Pariwisata juga merupakan sektor yang berpeluang untuk dikembangkan. Potensi wisata alam, bahari, agrowisata, dan budaya dapat dikembangkan secara lebih optimal dengan memanfaatkan kekayaan pemandangan alam Propinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki rona alam bergunung-gunung, garis pantai yang panjang, pulau-pulau, dan taman lautnya, serta latar belakang sejarah dan keanekaragaman tradisi, seni, dan budaya setempat yang unik dan menarik.

Wilayah Sulawesi Tenggara terdiri dari pulau-pulau kecil dan sekitar 68 lokasi terumbu karang yang telah diidentifikasi yang potensial untuk pengembangan kawasan ekowisata bahari, diantaranya terdapat di taman laut nasional Wakatobi dan Taman Wisata Laut Teluk Lasolo dan kepulauan Padamarang. Selain itu, bagian Muara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai juga potensial untuk dikembangkan sebagai obyek pariwisata bahari.³⁶

g. Sektor Pertambangan

Pertambangan merupakan sumberdaya yang potensial di wilayah Sulawesi Tenggara antara lain yaitu aspal, marmer dan biji nikel. Biji nikel dan aspal merupakan dua jenis produksi pertambangan yang menonjol di Sulawesi tenggara. Jumlah produksi nikel tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu lebih dari 4 kali lipat disbanding tahun 2016. Sedangkan jumlah produksi aspal tahun 2017 menurun sebesar 84,16% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Hal tersebut karena beberapa perusahaan pertambangan aspal tutup dan tidak beroperasi atau berproduksi lagi.

³⁶ Portal Resmi Sulawesi Tenggara. "Potensi Pariwisata". Sultraprov.go.id. Diakses dari http://sultraprov.go.id/potensi_pariwisata pada 15 Desember 2018.

Di sektor pertambangan dan galian, Propinsi Sulawesi Tenggara memiliki potensi berbagai mineral dan bahan galian terutama bahan logam seperti nikel di daerah Pomala dan di Kolaka, aspal di Buton serta bahan lainnya, seperti chromit, pasir, batu koral, batu kali, marmer, batu gamping, serta tanah liat yang tersebar dalam jumlah yang cukup besar untuk dikembangkan.

2. Potensi Pertambangan sebagai daya Tarik investasi di Sulawesi Tenggara.

Seperti diketahui, sejarah pertambangan nikel di Kabupaten Kolaka (sebagai mana diulas Harian Kompas) bermula pada tahun 1909 EC Abendanon, seorang ahli geolog asal Belanda, menemukan bijih nikel di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Eksplorasi bijih nikel sendiri baru dilaksanakan pada tahun 1934 oleh Oost Borneo Maatschappij (OBM) dan Bone Tole Maatschappij. Pengapalan pertama 150.000 ton hasil tambang itu dilakukan OBM empat tahun kemudian ke negara Jepang. Kegiatan penambangan nikel merupakan kegiatan penambangan yang paling diminati oleh investor karena nikel di Sulawesi Tenggara merupakan yang paling luas cakupan penggunaan lahannya. Hal tersebut karena permintaan nikel dunia sampai saat ini sangat tinggi dan juga harganya yang terus naik. Nikel dimanfaatkan sebagai bahan campuran dalam industri besi baja agar kuat dan tahan karat. Pencampuran tembaga dengan nikel akan menghasilkan garpu, sendok, uang logam/koin hingga rel kereta untuk pembangunan infrastruktur.³⁷

Dalam perkembangan sejarah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1960 dan Undang-Undang (UU) Pertambangan Nomor 37 Tahun 1960, Pemerintah RI mengambil alih penambangan tersebut dan

³⁷ Triswan Susenno dan Endang Mulyani. (2012). "Konsep Pengembangan Wilayah Sulawesi Tenggara Berbasis Komoditas Unggulan Sektor Pertambangan". Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara, Vol 8 No.3, Bandung:Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, hlm.119.

berdirilah PT Pertambangan Nikel Indonesia (PNI). Penambangan logam putih berlambang kimia Ni ini, kemudian terbukti memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Saat Sultra berupaya menjadi daerah otonom yang lepas dari Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), sumber daya alam Kabupaten Kolaka itu diyakini mampu menjadi sumber ekonomi untuk mengelola rumah tangga sendiri.

Wilayah di jazirah tenggara Pulau Sulawesi itu kemudian ditetapkan menjadi provinsi baru, melalui UU No 13/1964. Dalam logo provinsi yang berhari jadi tanggal 27 April ini terdapat warna coklat sebagai lambang tanah yang mengandung nikel di Kabupaten Kolaka. Waktu terus bergulir. PT Per-tambangan Nikel Indonesia di-merger dengan enam perusahaan negara lainnya seperti PN Logam Mulia pada 5 Juli 1968 dan berubah menjadi PT Aneka Tambang. Areal kuasa pertambangan di Pomalaa ini-yang mencatatkan sahamnya di pasar modal pada tahun 1997-luasnya 8.314 hektar. Selain bijih nikel, perusahaan ini juga memproduksi feronikel atau feni yang merupakan paduan logam antara nikel dan besi (fero).

Tahun 2008 dihasilkan feronikel sekitar 10.000 ton nikel dan sekitar tiga juta wmt (wet metric ton) bijih nikel. Bijih nikel dipasarkan ke Jepang dan Australia. Sedangkan feronikel dalam bentuk batangan logam atau ingot dijual ke negara Jerman, Inggris, Belgia, dan Jepang. Harga jualnya berdasarkan pada harga logam internasional yang mengacu pada London Metals Exchange (LME). Feronikel hasil penambangan perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta ini, tahun lalu dihargai 3,73 dollar Amerika Serikat (AS) per pon. Sedangkan untuk bijih nikel tergantung pada tinggi rendah kadarnya.

Layaknya produk tambang yang memiliki nilai jual tinggi seperti minyak bumi dan emas, negara lalu mengklaim nikel sebagai miliknya. Tidak mengherankan bila hasil penjualan ke-kayaan daerah berlambang burung raksasa ini lebih menggembungkan pundi-pundi uang pemerintah pusat

dibandingkan kas daerahnya sendiri. Usaha pertambangan dan penggalian berada di peringkat keempat dari sembilan lapangan usaha yang ada.

Kontribusinya pada tahun 2000 sekitar Rp 163 milyar atau 8,66 persen dari seluruh kegiatan ekonomi senilai Rp 1,9 trilyun. Meskipun begitu, harus diakui, kehadiran badan usaha berusia 33 tahun ini menimbulkan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Dari kegiatan perusahaan ini di Pomalaa, setiap bulan kas daerah menerima pajak pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan rata-rata Rp 30 juta. Jumlah kas juga bertambah dari perolehan pajak penerangan jalan sebesar Rp 100 juta per bulan.

Meskipun memiliki bijih nikel berkualitas ekspor, bahan tambang ini tidak lantas menjadi usaha terbesar Kolaka. Pertanian merupakan lapangan usaha terbesar masyarakat kabupaten di bagian barat Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Sektor ini mampu menyerap 76.734 orang tenaga kerja. Total kegiatan ekonomi yang dihasilkan tahun 2000 besarnya Rp 765,2 milyar. Dari jumlah itu, separuhnya diperoleh dari kegiatan usaha di bidang perkebunan. Lahan perkebunan kabupaten yang terdiri dari pegunungan dan bukit yang memanjang dari utara ke selatan, terbanyak digunakan untuk areal tanaman kakao.

Sektor pertambangan provinsi Sulawesi Tenggara cukup potensial dan menjadi perhatian baik investor nasional maupun asing yang bergerak di bidang pertambangan. Sulawesi Tenggara memiliki kandungan tambang yang sangat potensial dan banyak perusahaan yang telah melakukan eksplorasi di Sulawesi Tenggara terutama di kabupaten Buton, Konawe, Konawe Utara, dan kabupaten lain di Sulawesi Tenggara. Hal ini membuktikan bahwa Sulawesi Tenggara memiliki potensi dalam sektor pertambangan yang dapat diandalkan dan sebagai penyumbang terbesar pendapatan daerah di provinsi Sulawesi Tenggara setelah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Potensi pertambangan yang dimiliki oleh Sulawesi Tenggara diantaranya adalah Tambang aspal di Kabupaten Buton, Tambang nikel di kabupaten Kolaka, Konawe Utara dan Konawe, potensi tambang marmer, batu granit dan krom tersebar di beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara dan untuk potensi tambang minyak di Kabupaten Buton Utara dan Buton. Khusus untuk tambang aspal, beberapa perusahaan memegang kuasa pertambangan (KP) untuk melakukan eksplorasi.

Ketertarikan investor cukup banyak untuk berinvestasi di sektor pertambangan Sulawesi Tenggara, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan bagi investor dengan membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan investor, seperti jalan, jembatan dan pelabuhan dan lainnya, serta diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat tahap eksploitasi tambang dan pada saat kegiatan investasi mulai dilaksanakan sarana yang dibutuhkan diupayakan dapat tersedia.

Kehadiran investasi di suatu daerah juga diharapkan akan membuka lapangan kerja baru dan masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa untuk melakukan investasi di bidang pertambangan, terdapat prosedur standar yang harus diikuti dan untuk pengendalian dan pengelolaan lingkungan di sekitar tambang tetap merupakan perhatian utama. Prosedur dan perizinan diawasi oleh Badan yang berwenang dalam mengatur jalannya aktivitas penanaman modal atau investasi di Indonesia yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sebelum mengetahui bagaimana aturan atau prosedur penanaman modal di Indonesia, penulis akan memberikan informasi mengenai Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

C. Permasalahan Investasi Asing di Provinsi Sulawesi Tenggara

Dari data di atas, dapat dikatakan bahwa realisasi investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara yang berhasil melampaui target hanya pada periode ketiga yakni pada tahun 2017. Pencapaian nilai investasi sebesar Rp. 11 Triliun tersebut dikarenakan tidak

lepas dari adanya potensi dari berbagai sektor yang dimiliki oleh Sulawesi Tenggara itu sendiri, diantaranya seperti kepemilikan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah seperti emas, aspal, nikel, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk periode lainnya yaitu pada tahun 2015, 2016 dan terakhir tahun 2018 ketiganya tidak mencapai target yang ditentukan pemerintah. Kegagalan dalam mencapai target tersebut dikarenakan adanya kendala baik internal maupun eksternal yang menyebabkan nilai investasi setiap tahunnya tidak mencapai bahkan tidak melampaui target. Kendala eksternal salah satunya yaitu adanya perlambatan ekonomi global yang berdampak langsung terhadap arus investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyebabkan melambatnya arus masuk investasi di daerah tersebut. Selain faktor eksternal, faktor internal merupakan faktor penting dalam memahami perlambatan arus investasi yang masuk ke Provinsi Sulawesi Tenggara, Secara umum, kendala dan permasalahan dalam lingkup investasi asing di Indonesia, antara lain:³⁸

1. Resiko

Setiap kegiatan penanaman modal selalu dikaitkan dengan kemungkinan terjadi resiko yang mengakibatkan berkurangnya nilai modal. Masalah resiko menanam modal merupakan faktor yang cukup dominan yang menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan kegiatan investasi. Salah satu faktornya adalah aspek stabilitas politik dan keamanan. Hal ini sangat lumrah mengingat tanpa adanya stabilitas politik dan kepastian keamanan maka resiko kegagalan yang dihadapi akan semakin besar. Aspek stabilitas politik ini tidak dapat diramalkan yang mencakup keadaan seperti perang, pendudukan oleh negara asing, perang saudara, kudeta, revolusi, pemberontakan dan lainlain.

2. Birokrasi

Birokrasi yang terlalu panjang secara tidak langsung menciptakan situasi yang kurang kondusif bagi kegiatan

³⁸ Anwar M. Roem. (2013). "Peran dan Fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah untuk Menarik Investasi Asing di Papua" Jurnal Article, Vol 3 No 11, Papua: Universitas Yapis Papua.

investasi dan memberatkan para calon investor sehingga dapat membatalkan niat para investor untuk melakukan kegiatan investasi. Sebagai gambaran dapat dikemukakan bahwa salah satu keluhan yang paling sering dilontarkan oleh para investor asing adalah begitu banyaknya jenis perizinan yang harus diperoleh yang secara langsung memberikan dampak pembengkakan biaya perusahaan.

3. Transparansi dan Kepastian Hukum

Bagi calon investor, adanya transparansi dalam proses dan tata cara penanaman modal akan menciptakan suatu kepastian hukum serta menjadikan segala sesuatunya menjadi mudah diperkirakan, tetapi sebaliknya apabila tidak adanya transparansi dan kepastian hukum akan membingungkan para calon investor yang sering kali mengakibatkan biaya pengurusan yang cukup mahal.

4. Alih Teknologi

Adanya peraturan yang terlampaui ketat menyangkut kewajiban alih teknologi dari negara tuan rumah dapat mengurangi minat penanaman modal yang sangat berharga dalam mengembangkan usahanya, karena untuk menghasilkan teknologi tersebut membutuhkan biaya penelitian dan pengembangan yang sangat besar serta jangka waktu yang relatif panjang.

5. Jaminan Investasi

Salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan oleh para investor sebelum melakukan kegiatan penanaman modal adalah adanya jaminan dari negara tuan rumah terhadap kepentingan investor dalam hal terjadinya kerusuhan, huru hara, penyitaan, nasionalisasi, dan pengambilalihan.

6. Ketenagakerjaan

Faktor ketenagakerjaan merupakan faktor yang sangat dipertimbangkan oleh para investor karena dengan adanya tenaga kerja yang terlatih dan terampil dalam jumlah yang memadai serta upah yang tidak terlalu tinggi akan menjadikan minat investor untuk melakukan kegiatan investasi semakin besar. Ada hubungan timbal balik antara

investor dengan masalah ketenagakerjaan, dimana penanaman modal di satu pihak memberikan implikasi terciptanya lapangan kerja yang menyerap sejumlah besar tenaga kerja di berbagai sektor, sementara di lain pihak kondisi sumber daya manusia yang tersedia dan situasi ketenagakerjaan yang melingkupinya akan memberikan pengaruh yang besar pula bagi kemungkinan peningkatan dan penurunan penanaman modal.

7. Infrastruktur

Tersedianya jaringan infrastruktur yang memadai akan sangat berperan dalam menunjang keberhasilan suatu kegiatan penanaman modal. Oleh karena itu tersedianya jaringan infrastruktur pokok seperti perhubungan (darat, laut dan udara), serta sarana komunikasi merupakan faktor penting yang sangat diperlukan oleh calon investor.

8. Sumber Daya Alam

Masalah keberadaan sumber daya alam merupakan salah satu daya tarik utama dalam melakukan kegiatan investasi. Negara-negara yang kaya akan sumber daya alam sebagai bahan baku atau komoditi dalam industri telah menjadi sasaran utama investor untuk melakukan kegiatan investasi. Indonesia sebagai negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah merupakan tempat yang menarik untuk melakukan kegiatan investasi, meskipun demikian kekayaan alam yang begitu melimpah harus didukung investasi yang tepat dimana satu pihak dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor atas kontrak-kontrak yang dibuat dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam serta dilain pihak kegiatan penanaman modal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

9. Akses Pasar

Akses terhadap pasar yang besar juga menjadi sasaran utama para investor. Hal ini sangat mudah mengingat dengan terbukanya akses pasar maka akan mampu menyerap produk yang dihasilkan dari suatu kegiatan investasi

10. Insentif Perpajakan

Kegiatan investasi berorientasi mencari keuntungan (profit oriented), untuk itu diberikan beberapa insentif di bidang perpajakan guna membantu menyehatkan cash flow serta mengurangi secara substansial biaya produksi (production cost) yang pada akhirnya dapat meningkatkan profit margin dari suatu kegiatan investasi.

11. Mekanisme penyelesaian sengketa

Mekanisme penyelesaian sengketa merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan sebelum memutuskan untuk melakukan investasi. Mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak efektif dan tidak adil serta tidak menjamin adanya kepastian hukum dan penegakannya akan mendorong investor untuk membatalkan niatnya melakukan investasi bahkan lebih daripada itu investor akan merelokasi ke negara lain.

Dari permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan diatas, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam aktivitas penanaman modal terutama Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki beberapa permasalahan tersendiri, antara lain sebagai berikut:

a. Kualitas Birokrasi

Birokrasi sendiri berasal dari bahasa Inggris *Breaucracy* yang terdiri dari kata *breau* dan *cracy*. *Breau* yang artinya meja sedangkan *cracy* merupakan kekuasaan, sehingga birokrasi dapat didefinisikan sebagai kekuasaan yang bersifat formal yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip kerja organisasi. Sedangkan, dalam buku yang berjudul "*Bureaucracy*" yang dikemukakan oleh Peter M. Blau. Dan W. Meyer birokrasi merupakan organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif dengan mengkoordinasikan kegiatan atau pekerjaan secara teratur dan sistematis dari berbagai anggota

organisasi.³⁹ Di dalam investasi, kualitas birokrasi merupakan hal yang penting. Unsur yang mendukung birokrasi merupakan kualitas pelayanan suatu badan atau organisasi penanaman modal Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disingkat DPMPTSP kepada calon investor khususnya investor asing yang ingin menanamkan modalnya disana.

DPMPTSP merupakan dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang ditindak lanjuti dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2011 Nomor 12 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara. DPMPTSP memiliki kewenangan menerbitkan atau menolak serta penandatanganan surat izin maupun non-izin. Serta menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non-perizinan meliputi penetapan SOP dan SPP serta pemrosesan administrasi perizinan dan non-perizinan.⁴⁰

Permasalahan investasi asing yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara yang berkaitan dengan permasalahan birokrasi yaitu terjadi pada Dinas Penanaman Modal pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) itu sendiri, pasalnya realisasi yang terjadi pada periode kedua pada tahun 2016 yang dinilai realisasi investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak mencapai target dikarenakan regulasi yang kurang

³⁹ Rina Martini. (2012). *“Buku Ajar Birokrasi dan Politik”*, Semarang : UPT UNDIP Press Semarang, hlm 9.

⁴⁰ DPMPTSP. Diakses dari <https://dpmptsp.sultraprov.go.id/page/Tentang-DPMPTSP>

mendukung kegiatan penanaman modal di Sulawesi Tenggara seperti pengurusan perizinan penanaman modal yang berbelit-belit dengan birokrasi yang panjang. Hal tersebut menimbulkan keluhan para investor untuk dapat menanamkan modalnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2016 adanya kesenjangan di dalam kegiatan berinvestasi, lebih banyaknya investor atau perusahaan baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) yang telah mengantongi izin namun hanya sedikit dari investor atau perusahaan yang telah mengantongi izin tersebut yang telah beroperasi. Ada sekitar 378 investor atau perusahaan yang telah mengantongi izin sekitar 128 perusahaan berasal dari dalam negeri dan 250 perusahaan asing namun yang telah beroperasi hanya 73 perusahaan yang terdiri 24 penanaman modal dalam negeri dan 47 penanaman modal asing. Adanya kesenjangan tersebut menurut kepala Badan Penanaman Modal Sulawesi Tenggara Masmuddin Hussain, dikarenakan belum memiliki izin terkait lahan konsesi pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara.⁴¹

Selain permasalahan perizinan lahan yang terkait permasalahan birokrasi investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara juga diperparah dengan adanya tarik-menarik antara kepentingan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, keduanya merasa saling berkepentingan atas penanaman modal daerah. Adanya otonomi daerah dinilai semakin mempersulit aktivitas penanaman di Indonesia, pasalnya pemerintah pusat dapat mengeluarkan keputusan presiden khusus mengenai proses perizinan usaha di daerah dikarenakan proses penanaman modal yang cukup lama dan berbelit-belit.

⁴¹ Redaksi WE online. (2016). "Sepanjang 2016, Nilai Investasi Sultra Capai Rp. 3,09 Triliun", [wartaekonomi.co.id](https://www.wartaekonomi.co.id/read126218/sepanjang-2016-nilai-investasi-sultra-capai-rp309-triliun.html) diakses dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read126218/sepanjang-2016-nilai-investasi-sultra-capai-rp309-triliun.html> pada 18 Februari 2019.

b. Keadaan Infrastruktur Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat suatu negara dalam lingkup ekonomi maupun sosial seperti menyediakan sarana dan prasarana umum. Sarana umum itu sendiri dapat diartikan sebagai fasilitas public yang meliputi jalan, rumah sakit, jembatan, air, telekomunikasi, listrik, dan lain sebagainya.⁴² Infrastruktur dapat juga didenfsikan sebagai fasilitas maupun struktur dasar, peralatan-peralatan, dan instalasi-instalasi yang dibangun pemerintah dan yang dibutuhkan masyarakat untuk berjalannya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat di suatu negara.

Pembangunan infrastruktur yang baik akan menjamin efisiensi, memperlancar pergerakan barang dan jasa dan juga meningkatkan nilai tambah perekonomian. Tersedianya infrastruktur bagi suatu daerah merupakan faktor peningkatan produktivitas daerah. Ketersedian infrastruktur seperti jembatan dan jalan raya dapat membuka akses ke segala bidang khususnya investasi.

Didalam kegiatan penanaman modal dan investasi, Infrastruktur merupakan pendukung utama dari kegiatan industri dan juga sebagai modal utama untuk dapat menarik penanaman modal ke suatu daerah, terutama menarik investor asing untuk menanamkan modalnya. Namun, menurut seurvey yang telah dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi bahwa keterbatasan infrastruktur masih menjadi hambatan bagi masuknya investasi ke daerah di Indonesia. Keterbatasan infrastruktur tersebut menyebabkan investor

⁴² Hapsari, T. (2011). "Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia". Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesritas Negeri Syarif Hidayatullah.

mengurungkan niatnya untuk menanamkan modalnya ke Indonesia dan hal tersebut menjadi sebuah hambatan masuknya investasi ke Indonesia. Kondisi infrastruktur di Indonesia sendiri seperti adanya ketimpangan atau tidak meratanya pembangunan dan persebaran infrastruktur di daerah seperti di daerah luar pulau Jawa.⁴³

Di Sulawesi tenggara, kondisi Infrastruktur masih sangat terbatas untuk mendukung kegiatan investasi di daerah itu. Secara umum, kondisi infrastruktur Provinsi Sulawesi Tenggara seperti listrik dan jalan masih bermasalah. Kondisi jalan di Sulawesi Tenggara masih memiliki keterbatasan kondisi. Seperti berikut:

- 1) Jalan raya merupakan prasarana transportasi darat dan memiliki peranan yang penting sebagai penunjang transportasi. Secara kuantitas, ketersediaan jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara cukup memadai, namun masih adanya masalah jalan yang rusak yang mana hal tersebut menjadi penghambat bagi aktivitas perekonomian di Provinsi Sulawesi Tenggara. seperti tercatat oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara kurang lebih sepanjang 5.000 kilometer dan kurang lebih sebanyak 6.849 kilometer jalan di Sulawesi Tenggara belum teraspal atau sebanyak 50% dari 12.316 kilometer jalan di Sulawesi tenggara rusak berat, terutama di poros Muna (Buton Tengah), Ereke (Buton Utara) menuju Laialimu (Buton), Poli-Polia dan Rate-Rate (Kolaka Timur) dan Maromo Konasel menuju kota Kendari.⁴⁴ Kondisi jalan di Sulawesi juga belum mampu menjadi pendorong

⁴³ Kementerian perindustrian. (2016). "Birokrasi dan Infrastruktur Jadi Kendala". Diakses dari, <http://www.kemenperin.go.id/artikel/5496/Birokrasi-&-Infrastruktur-Jadi-Kendala> pada 18 Agustus 2019.

⁴⁴ Heeryl. (2018). "50 Persen Infrastruktur Jalan Rusak". kendaripos.co.id, diakses dari <https://kendaripos.co.id/2018/04/50-persen-infrastruktur-jalan-rusak/> pada 20 Februari 2018.

- utama karena terbatasnya jalan dalam menghubungkan pusat-pusat ekonomi baru.⁴⁵
- 2) Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi yang mengalami kekurangan energi listrik di Indonesia. Pada umumnya, aliran listrik di Sulawesi Tenggara diperoleh dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Tidak seperti di kota, penduduk di pedesaan Sulawesi Tenggara masih belum terjangkau dengan jaringan listrik PLN melainkan masih menggunakan tenaga listrik non-PLN dan masih menggunakan alat tradisional seperti lampu minyak tanah. Konsumsi listrik di Sulawesi Tenggara termasuk rendah dan kurang rata-rata tingkat konsumsi listrik nasional sebesar 787,6 kWh. Energi listrik yang tersedia di Sulawesi Tenggara saat ini besarnya 275,86 MW, sedangkan daya terpasang sebesar 341,46 MW. Tingginya daya terpasang dan rendahnya energi listrik PLN tersebut mengharuskan PLN di beberapa daerah harus melakukan pemadaman bergilir. Selain itu masih banyak daerah di Sulawesi Tenggara yang belum teraliri listrik. Energi listrik yang tersedia tersebut baru melayani 449.713 keluarga, sedangkan sisanya sebanyak 157.473 keluarga belum menikmati listrik. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat harus diimbangi dengan ketersediaan tenaga listrik karena meningkatnya permintaan tenaga listrik.⁴⁶ Kondisi perlistrikan di Provinsi Sulawesi Tenggara pada sektor swasta yaitu adanya kendala di dalam kegiatan investasi dan penanaman modal sebab energi listrik tidak tersedia atau

⁴⁵ Sabarudin S B R Uho. "Infrastruktur Jokowi dan Mimpi Ornat Sulawesi". Academia, diakses dari https://www.academia.edu/10956900/Infrastruktur_Sulawesi pada 20 Februari 2019.

⁴⁶ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2015). "Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara 2015". Perpustakaan.bappenas.go.id, diakses dari [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/160883-\[_Konten_\]_Konten%20D1130.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/160883-[_Konten_]_Konten%20D1130.pdf) pada 20 Februari 2019.

mendukung pembangunan semelter di wilayah Sulawesi Tenggara.

- 3) Air Bersih di Sulawesi Tenggara sama dengan permasalahan lainnya yang ada di daerah tersebut karena kurangnya pemerataan terhadap kebutuhan akan air bersih. Hanya sebagian kecil masyarakat mendapatkan akses air bersih yaitu hanya masyarakat yang berdomisili di Ibukota Provinsi dan Kabupaten saja. Sedangkan, masyarakat pedesaan masih belum memiliki akses air bersih dan pada umumnya di penduduk pedesaan menggunakan air yang berasal dari sumur atau mata air. Permasalahan pemerataan air bersih yang dimaksud yaitu air bersih yang dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), walaupun masih adanya daerah di Sulawesi Tenggara yang belum menerima akses air bersih namun jumlah pengguna jasa PDAM pada tahun 2017 di Sulawesi Tenggara terus meningkat, tercatat pada tahun 2017 sebanyak 109.773 pelanggan meningkat sebesar 45,56% dari tahun 2015. Nilai air bersih yang disalurkan juga meningkat yaitu sebesar Rp. 80 Miliar dari tahun 2015 yang hanya mencapai Rp. 70 Miliar.⁴⁷

c. Sumber Daya Manusia

SDM atau Sumber Daya Manusia merupakan salah satu permasalahan yang timbul dalam kegiatan investasi asing. Permasalahan Sumber Daya Manusia yang dimaksud yaitu baik dari aparat birokrat maupun dari masyarakat Sulawesi Tenggara itu sendiri yang terlibat dalam kegiatan investasi asing.⁴⁸

Dalam lingkup aparat birokrat yang dimaksud adalah masih kurangnya kompetensi Sumber Daya

⁴⁷ BPS. (2018) "Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2018". BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. hlm.243.

⁴⁸ Sutarto. (2008). "Menko Budiono Akui Pembangunan Ekonomi Belum Berhasil". Tempo, diakses dari <https://m.tempo.co/read/news/2007/10/22/056109877/menko-boediono-akuipembangunan-ekonomi-belum-berhasil>, pada 20 Februari 2019.

Manusia yang membidangi promosi dan kerjasama, pelayanan perizinan, pengembangan dan pengendalian di bidang penanaman modal dan juga kurangnya kuantitas atau jumlah Sumber Daya Alam pada bidang pelayanan perizinan merupakan masalah di dalam aktivitas kegiatan penanaman modal. Permasalahan yang ada tersebut menyebabkan penurunan dari kualitas birokrasi penanaman modal di masing-masing daerah. Kualitas dari aparat birokrat merupakan hal peting bagi keberhasilan kegiatan investasi. Selain kejujuran, disiplin serta keterampilan, memiliki kemampuan dalam hal penguasaan materi investasi dan cara birokrat dalam memberikan pengenalan mengenai potensi maupun kondisi wilayah pada saat adanya promosi, pelayanan perizinan hingga pengembangan dan pengendalian akan berhasil mempromosikan wilayah kepada calon investor yang ingin menanamkan modalnya di Sulawesi Tenggara. Tanpa adanya hal tersebut diatas bisa terjadi praktek penyimpangan kebijakan.

Selain permasalahan dalam lingkup birokrat, Keterampilan dari masyarakat daerah Sulawesi Tenggara juga menjadi keluhan investor asing karena keterampilan dan kemampuan masyarakat tidak sepadan dengan apa yang dibutuhkan oleh investor asing. Permasalahan tersebut dikarenakan faktor latar belakang masyarakat yang kurang kesadaran akan pentingnya pendidikan. Hal tersebut dibuktikan dengan data di Sulawesi Tenggara pada tahun 2015, bahwa angkatan kerja di daerah tersebut di dominasi oleh tamatan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas, di posisi kedua merupakan angkatan kerja yang hanya memiliki ijazah SMA jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat di tahun berikutnya, sedangkan D1 serta Sarjana di Sulawesi Tenggara memiliki jumlah yang rendah.

Permasalahan-permasalahan diatas dapat diatasi dengan cara meningkatkan kualitas birokrasi dan layanan publik. Kerana dengan memulai perbaikan dalam lingkup

birokrat atau SDM pada penanaman modal, secara tidak langsung juga akan merubah tatanan atau kegiatan penanamann modal serta menjadi langka yang baik untuk memperbaiki masalah kondisi penanaman modal asing di Provinsi Sulawesi Tenggara.